

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI E-KATALOG DI KABUPATEN SINJAI

Nur Islamia Sam¹, Burhanuddin², Hamrun³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Email: nurislamia64@gmail.com

Abstrak

Dilakukan penelitian ini sebagai upaya menyelidiki keefektifan pengadaan barang serta jasa di Kabupaten Sinjai yang dilakukan melalui aplikasi e-katalog. Dasarnya, pengadaan barang serta jasa ini menjadi suatu yang krusial dan menjadi bagian dari fungsi pemerintahan yang berguna mendukung berjalannya kegiatan pembangunan di wilayah lokal. Pengadopsian teknologi informasi serta komunikasi turut menjadi bagian penting pada tingkat pemerintah daerah sehingga kegiatan yang dilakukan terlebih dalam pengadaan mampu dijalankan dengan transparan, terpercaya akuntabilitasnya, serta efisien. Metode penelitian dilakukan dengan cara-cara kualitatif deskriptif serta data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Adapun temuan dari penelitian ini mendapati bahwa di Kabupaten Sinjai, penerapan E-Katalog telah memberi kemudahan untuk melakukan pengadaan, hal ini turut mendorong kecepatan serta efisiensi. Integrasi lembaga kebijakan serta komunikasi yang berlangsung baik antar pihak mendukung berjalannya pengadopsian teknologi ini. Kemudian penyesuaian harga, pemahaman penggunaan aplikasi, serta fleksibilitas untuk dapat memperbarui informasi maupun produk bagi pemilik barang memperkuat perubahan dan kebutuhan bagi pengguna. Pada akhirnya adanya penelitian ini memberi pemahaman akan aplikasi E-katalog sebagai alat yang mendorong efisiensi, peningkatan transparansi, serta efektivitas Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam aktivitas pengadaan barang serta jasa.

Kata Kunci: E-Katalog, Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Sinjai.

Abstract

The purpose of this study was to investigate how well Sinjai Regency's e-catalog application works for purchasing goods and services. In general, procurement plays a vital role in the government's operations, assisting local development initiatives. At the local government level, information and communication technology adoption is essential for guaranteeing accountable, transparent, and effective procurement processes. The research employed qualitative descriptive methods, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the e-catalog's adoption in Sinjai Regency has streamlined procurement, increasing effectiveness and rapidity. The implementation of this technology is helped by the integration of policy institutions along with effective communication among stakeholder. Additionally, price adjustment, good understanding of the application, and flexibility in updating product and information have strengthened adaptation to changes and user needs. Finally, this study provides insights into how e-catalog applications can be an effective tool in promotes efficiency, increased transparency, and effectiveness in the Sinjai Regency Government's procurement activities.

Keywords: E-catalog, Procurement of Goods and Services, Sinjai Regency.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan juga jasa oleh pemerintah yang berwenang memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kelancaran pemerintahan sekaligus proses pembangunan. Namun demikian, sektor publik kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan signifikan, terutama berkaitan dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa disebut dengan KKN selama pengadaan berlangsung. Nilai yang tinggi untuk melakukan pengadaan memancing beberapa pihak melakukan praktek curang, kemudian buruknya akuntabilitas kian menambahkan kemungkinan tersebut. Sebab itulah, transparansi, integritas, serta akuntabilitas perlu digencarkan guna menjadikan kegiatan penganggaran ini akhirnya memenuhi tiap-tiap kebutuhan masyarakat (Arsana, 2016).

Pengadaan sendiri ini berguna agar pemerintah dapat menjalankan pembangunan. Dari berbagai kacamata manapun, kemajuan Indonesia tak terlepas dari kegiatan ini. Ekonomi mampu diwujudkan pertumbuhannya dengan dukungan pembangunan. Kemudian dalam halnya kesosialan, pengadaan ini berguna agar masyarakat bisa mendapat taraf hidup yang lebih baik, perolehan layanan kesehatan yang baik, serta hal-hal yang mendukung pencapaian pemenuhan hidup lainnya. Kebutuhan pemerintah kian turut meningkat sejalan dengan tumbuhnya otonomi tiap daerah serta ekonomi negara secara lebih luas, hal ini kemudian mendorong terus adanya pengadaan barang untuk barang maupun jasa (Iqbal, 2020).

Guna mendukung adanya transparansi, ketepatan, serta efisiennya pengadaan pemerintah, maka dari itu dikeluarkanlah Perpres No. 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang ataupun jasa ini. Secara singkat, kini pengadaan pemerintah akan dijalankan secara elektronik. Perubahan cara-cara dalam melakukan lelang yang sejak 2010 berpindah ke cara daring, banyak sedikitnya turut membuat proses pengadaan ini membantu penghematan belanja negara juga membuat prosesnya lebih jernih (Mahardhika, 2021).

Sistem teruntuk pengadaan barang ataupun jasa ini oleh otoritas berwenang menjadi hal yang krusial sehingga perlu adanya perkembangan guna mewujudkan keadilan dalam tatanan kerja pemerintah serta menciptakan kerja yang lebih bersih dari kegiatan-kegiatan tak etis seperti halnya KKN ataupun memberi kesempatan bagi pelayan publik dapat memanfaatkan apa yang seharusnya milik publik menjadi milik kepentingan pribadinya (Listyanto, 2012).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang telah disebutkan sebelumnya, mengatur secara menyeluruh proses pengadaan, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, persiapan pelelangan, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang, penandatanganan kontrak, hingga tahap akhir berupa penyerahan hasil pekerjaan. Efisiensi akan proses pengadaan tersebut pada intinya sangat berlandaskan pada prosedur pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang akurat dapat memastikan bahwa barang atau jasa yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan diterima pada waktu yang telah ditentukan. Barang/jasa yang dibeli sudah memenuhi standar dan tersedia di pasar dalam kuantitas yang cukup sesuai kebutuhan dapat dilakukan secara elektronik atau bisa disebut dengan e-purchasing. Pembelian barang maupun jasa yang ketersediaan barangnya serta jumlahnya telah memadai kemudian diproses dengan e-purchasing. Aplikasi ini berisi e-katalog yang memuat akan daftar serta spesifikasi dari barang-barang yang akan dibeli, selain itu harga dari barang di tiap produsen atau penyedia barang tersebut turut dimuat sehingga tak ada hal yang ditutupi (Hafidz & Widodo, 2015).

Katalog elektronik ini menjadi sistem informasi yang secara penuh memberi informasi akan barang yang dibutuhkan. Hal ini merupakan dampak dari perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu melalui terbitnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dimana penggunaan e-katalog dijalankan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (Saputra, 2021).

Adapun data yang terdaftar oleh LKPP Kabupaten Sinjai didapati ada 447 toko yang menggunakan aplikasi katalog elektronik ini sejak dioperasikan pada bulan Januari. Hal ini mengartikan pula bahwa penyedia barang yang terdaftar pada aplikasi terus bertambah tiap bulan. Kemudian, mengenai barang yang tersedia sebanyak 28 etalase yang meyangkut semua barang yang dibutuhkan OPD, di daerah Kabupaten Sinjai untuk saat ini, dari alat kebersihan, kebutuhan pembangunan untuk gedung, konsumsi, perlengkapan tulis, serta kebutuhan pendukung lainnya. Melalui data tersebut dapat dikatakan bahwa pada katalog elektronik yang terdaftar di Kabupaten Sinjai cukup memadai.

Sistem katalog elektronik milik pemerintah Kab. Sinjai pada dasarnya telah aktif sejak 2018 yang berguna dalam pengadaan barang serta jasa bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, dari pengamatan awal penggunaan e-katalog ini belumlah mencapai optimal. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian kualitas barang ataupun masalah ketepatan barang tiba. Fakta di lapangan mendapati adanya masalah-masalah serupa, meski aplikasi katalog elektronik dinilai efektif. Misalnya saja mengenai penampilan informasi produk yang tak jarang sulit ditampilkan keseluruhan. Akibatnya pembeli tak mampu melihat apakah barang masih tersedia atau tidak, hal ini kemudian menyebabkan adanya kejadian pembelian barang yang ternyata tidak memiliki stok. Hal ini didapati pula di Dinas yang menangani urusan Lingkungan Hidup serta aspek Pertahanan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan melalui temuan penelitian lain, yakni teridentifikasi pula adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan barang di katalog elektronik. Sehingga dari temuan ini perlu adanya perbaikan pada e-katalog milik Kabupaten Sinjai sehingga mampu dipakai dengan efektif.

Mendapati adanya ketidak efektifan pada e-katalog yang dipakai oleh pemerintah Kab. Sinjai meningkatkan dorongan untuk mendalami lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut. Pengambilan langkah tersebut ditujukan guna paham soal akar dari permasalahan yang mendasari tidak sesuainya spesifikasi barang dan juga keterlambatan, serta kendala lainnya dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

Melalui observasi ini turut juga bakal dilakukan analisa pada pengalaman yang diperoleh oleh para pengguna, baik dari sisi pemilik usaha yang terdaftar dalam sistem e-katalog maupun dari pihak instansi pemerintah yang memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, lewat penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberi wawasan yang kemudian dapat menjadi solusi guna pengimplementasian katalog elektronik milik pemerintah Kabupaten Sinjai dapat lebih baik. Kemudian, dari temuan-temuan yang didapati mampu menjadi landasan sehingga menciptakan sistem yang mendukung akuntabilitas, kualitas, serta transparansi pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog di Kabupaten Sinjai.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Sinjai, khususnya di Unit Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlokasi di Gedung C mulai dari 13 Januari hingga 13 Maret 2024. Penelitian dilakukan dengan cara-cara kualitatif serta pendekatan yang deskriptif untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fakta dan keadaan di lapangan. Informan penelitian terdiri dari beberapa pihak, termasuk Kepala Sub Bagian Layanan Secara Elektronik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang melakukan pengadaan, serta pemilik Warung Nikmat Sinjai. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan langkah awal melalui reduksi data, kemudian data disajikan, dan terakhir akan dibuat simpulan dari temuan. Validitas data diuji melalui cara-cara triangulasi, mengacu pada keberagaman sumber, triangulasi teknik serta triangulasi waktu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan pada dasarnya menjadi dasar konseptual dari apa yang ingin dicapai melalui penerapan aplikasi e-katalog ini, misalnya seperti kecepatan, kemudahan mendapat aplikasi, hingga bertemunya harapan pengguna dengan hasil yang mereka rasakan di Kabupaten Sinjai.

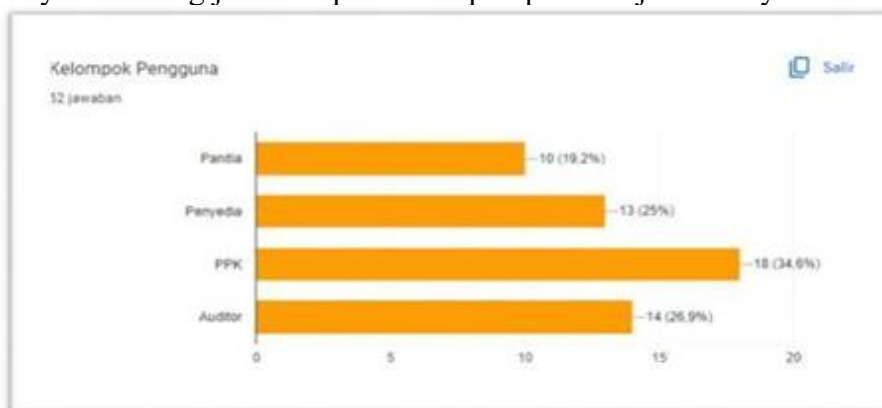
Adapun indikatornya, yakni kecepatan, kemudahan, serta kesesuaian harapan. Peneliti turut melakukan wawancara dengan empat informan, yakni Kepala Sub Bagian LPSE, pejabat yang melakukan pengadaan, Pemilik warung Nikmat Sinjai yang merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang, serta PPK Sekretaris DinKes Kab. Sinjai.

a. Kemudahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa

Tolak ukur kemudahan yang dimaksud merupakan keleluasaan maupun kesederhanaan bagi para pengguna selama mengakses e-katalog via aplikasi di Kab. Sinjai. Adapun melalui sesi tanya jawab dengan Kepala Subbagian LPSE menerangkan: “..mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, kan sebelumnya ada lewat tender lewat aplikasi juga tetapi dengan adanya e-katalog ini prosesnya lebih muda lagi dan mempersingkat yang dulunya penyedia melalui beberapa tahap termasuk tahap evaluasi sekarang penyedia hanya memasukkan suratnya sebagai penjual atau penyedia barang yang dicantumkan pada etalase e-katalog dan tinggal meng klik barang barang apa yang dimasukkan di e-katalog, jadi lebih mempermudah lagi proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Sinjai” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas, e-katalog sebetulnya berguna ketika ingin melakukan pengadaan agar pelaksanaan kegiatan ini terbukti lebih efisien dibandingkan metode konvensional melalui proses tender atau aplikasi sebelumnya. Pada metode sebelumnya, penyedia barang dan jasa harus melalui sejumlah tahapan, termasuk tahap evaluasi yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun, dengan adanya implementasi e-katalog, proses tersebut menjadi lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya, pemilik barang cukup memasukan surat-surat yang menjelaskan spesifikasi barang yang mereka sediakan sebagai pemenuh data di etalase katalog. Sedangkan bagi instansi yang membutuhkan barang akan lebih mudah ketika mengakses data mengenai barang yang mereka butuh.

Melalui survei daring yang dilakukan kepada 52 orang mengenai kepuasan layanan didapati berbagai respon yang berbeda dari berbagai kategori pemberi jawaban yang terdiri dari para kelompok kerja serta pejabat berwenang soal pengadaan sebagai panitia, auditor, PPK, serta penyedia barang/jasa. Adapun kelompok pemberi jawabannya adalah:



Gambar 1. Kelompok Pengguna E-Katalog

Berdasarkan hasil penyebaran survei, diperoleh sebanyak 52 responden yang telah mengisi kuesioner. Responden tersebut terdiri atas 9 orang panitia, 17 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 13 penyedia, dan 13 auditor. Adapun hasil survei kepuasan layanan publik ini mengacu pada pelayanan yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sinjai.

Melalui paparan di atas didapati ada sebanyak 9 panitia yang mengisi survei, 17 anggota PPK, 13 penyedia, serta 13 auditor sehingga didapati ada 52 responden. Dari seluruh kelompok pemberi jawaban tersebut menyatakan kepuasan akan Kualitas pelayanan publik pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sinjai dinilai berada pada tingkat yang baik. Hasil ini didapati dari perolehan skor atas 10 variabel pertanyaan dengan lima indikator. Skor kepuasan pelayanan yang didapat adalah 77,99%. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan pejabat pengadaan yang menyatakan: “..Pengguna dalam hal konsumen yaitu adalah kementerian lembaga atau pemda bahwa aplikasi e-katalog itu membuat akses lebih mudah selalu diperbaharui atau di update dari segi sistemnya ataupun barangnya, informasi barang menjadi lebih transparan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024).

Melalui sesi tanya jawab tersebut, mampu diketahui dengan adanya katalog elektronik ini memberikan manfaat bagi para pengguna yang membutuhkan barang atau melakukan pengadaan seperti pemerintah daerah. Adapun manfaat yang dimaksud seperti kemudahan akses, informasi yang jelas, pembaruan barang yang diperbarui berkala di aplikasi. Manfaat yang dirasakan ini kemudian mendorong pada kemampuan untuk dapat mengatur pengadaan dengan lebih teratur serta menjadikan kegiatan pengadaan lebih efektif. Sehingga dapat dikatakan pula dengan adanya katalog elektronik ini memberi dampak positif bagi perubahan kebiasaan di lembaga pemerintahan dalam melakukan pengadaan akan jasa ataupun barang, hal ini mendorong akuntabilitas proses pengadaan serta pada peningkatan transparansi. Kemudian melalui tanya jawab pada pemilik usaha Warung Nikmat Sinjai, menerangkan: “..Cukup Memudahkan dan sangat Efisien bagi kami karna bisa ber komunikasi dan melakukan pesanan kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertemu secara langsung cuman kendalanya kami yaitu karna tidak ada notifikasi khusus dari E-Katalog, cuman notifikasi langsung masuk dari e-Mail dan kadang notif diemail itu agak lambat”. (Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2024).

Lewat hasil tanya jawab yang telah dilakukan, pengguna aplikasi e-katalog selaku pelaku usaha seperti pemilik Warung Nikmat Sinjai di Kabupaten Sinjai, merasa memperoleh manfaat berupa kemudahan akses dalam proses pengadaan. Mereka menilai penggunaan aplikasi ini sangat efisien karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Namun demikian, terdapat kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha, yakni keterlambatan dalam menerima informasi pemesanan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya notifikasi langsung dari aplikasi e-katalog; pemberitahuan hanya masuk melalui e-mail, yang notifikasinya tidak secepat aplikasi pesan instan lainnya, sehingga informasi pesanan cenderung terlambat diterima.

b. Proses Servis yang Cepat

Tolak ukur kecepatan servis atau layanan ialah deteksi secara cepat yang diberikan oleh aplikasi E-Katalog pengadaan barang dan jasa, dan dibutuhkan para pengguna di daerah Kabupaten Sinjai. Wawancara dilakukan peneliti dengan PPK atau penyedia pelaku usaha, menerangkan: “..Kalau menurut saya yah agak susah untuk lebih cepat mengetahui karena tidak ada notif khusus di e-katalog ketika ada yang ingin berbelanja, notifnya hanya langsung di email” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024).

Wawancara diatas menghasilkan pernyataan yang dapat diartikan walau aplikasi e-katalog memberi akses secara mudah dan sistem maupun barang yang diperbarui secara berulang, masih ada tantangan untuk mendapatkan pemberitahuan aplikasi guna proses yang cepat dalam mengetahui ketersediaan barang. Pemberitahuan yang terbatas khususnya di aplikasi e-katalog, yang hanya diberikan lewat surel, membuat pengguna sangat kesulitan untuk mengetahui secara langsung bahwa peningkatan terjadi dalam sistem yang efektif untuk

pemberitahuan dalam aplikasi dan secara langsung di aplikasi e-katalog, guna mempermudah penggunaannya untuk dapat informasi terkini mengenai barang atau jasa yang disediakan. Maka dari itu, pengguna bisa lebih cepat merespon dan memutuskan dalam proses pengadaan ini, prosesi efisiensi yang ditingkatkan dan juga penggunaan aplikasi yang responsif di Kabupaten Sinjai. Peneliti pun melakukan sesi wawancara terhadap Kepala SubBagian LPSE, menerangkan: “..Sebelum e-katalog itu kami sudah keliling ke opd opd melakukan sosialisasi untuk bagaimana menggunakan aplikasi dan kami mengumpulkan penyedia dan pengguna barang jasa ini untuk bagaimana cara menggunakan atau mengarahkan bagaiman penggunaan e-katalog itu sendiri dan melalui selebaran informasi di media sosial.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 30 Januari 2024*).

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan sosialisasi secara langsung terhadap para pengguna dan penyedia barang jasa, baik saat kunjungan ke berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ataupun lewat penyampaian informasi daring seperti sosial media dan selebaran yang diberikan secara langsung. Ini merupakan langkah tepat dan penting dalam pengenalan dan pengarahan penggunaan aplikasi ini. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung, pihak yang terkait pun bisa memandu secara praktis soal cara menggunakan e-katalog yang efektif, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ketidaktahuan yang dirasakan para pengguna maupun penyedia.

c. Selaras Dengan Harapan Pengguna

Tolak ukur selaras ataupun sesuai dengan harapan penggunaannya ialah Barang dan jasa yang disediakan melalui aplikasi ini telah sesuai dengan harapan serta ekspektasi pengguna dari berbagai unit kerja di Kabupaten Sinjai. Penelitian pun dilakukan lewat wawancara terhadap Kepala Subbagian LPSE, menerangkan: “..Sudah mendukung tapi belum mendukung secara full, karna dari banyaknya penyedia dan pengguna e- katalog yang datang kesini belum memahami dan kami jelaskan berulang ulang itu menandakan bahwa belum sepenuhnya maksimal tapi disamping itu juga karena memang tidak massif secara umum karena tentang teknologi banyak penjual yang belum terlalu paham menggunakan teknologi agak susah tanpa admin, jadi kami memang harus bekerja secara ekstra untuk supaya mereka paham” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa pengupayaan sosialisasi yang mendalam telah dilakukan oleh para penyedia maupun pengguna e-katalog telah terlibat dalam sistem tersebut, namun masih terdapat kendala terkait pemahaman dan penguasaan teknologi yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan e-katalog. Kehadiran banyak penyedia dan konsumen yang kerap perlu terhadap penjelasan yang terbilang repetitif kian menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap meningkatnya penggunaan e-katalog masih belum optimal. Kurang optimalnya pemahaman mengenai penguasaan penuh teknologi juga jadi tantangan lainnya untuk kalangan penjual, ini semakin menjadikan mereka kesulitan saat dihadapkan dengan penggunaan e-katalog tanpa uluran bantuan dari para admin, yang dikemudian hari membuat peneliti juga menanyakan berbagai kelompok kerja maupun pejabat pengadaan dan menerangkan: “..Pengguna dalam hal konsumen yaitu adalah kementerian lembaga atau pemda bahwa aplikasi e-katalog itu membuat akses lebih mudah selalu diperbaharui atau di update dari segi sistemnya ataupun barangnya ,informasi barang menjadi lebih transparan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif.” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 februari 2024).

Intisari dari pertanyaan dalam sesi sanya jawab diatas menunjukkan bahwa aplikasi e-katalog digunakan oleh Kementerian Lembaga maupun Pemerintah daerah justru membawa manfaat yang nyata dan berdampak besar. Akses yang jadi lebih mudah bagi para pengguna dihasilkan lewat aplikasi ini, tidak hanya itu, secara teratur juga dimodernisasi dan disempurnakan mulai dari segi system hingga informasi mengenai barang. Sekaligus menjadikan proses jasa hingga pengadaan barang jadi jauh lebih efektif, karena konsumen

secara cepat bisa mengetahui ketersediaan beragam barang mulai dari informasi ketersediaan, spesifikasi barang yang transparan, dan juga harga barang tersebut.

2. Integrasi

Konsep integrasi sendiri ialah proses upaya sosialisasi yang dilakukan Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, dalam rangka mengenalkan e-katalog lewat aplikasi, yang mencakup komunikasi, panduan penggunaan, hingga konsensus (kesepakatan bersama).

Hal yang menjadi tolak ukur ialah sebut saja komunikasi, panduan penggunaan, dan konsensus, dan arahan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai empat narasumber, yang meliputi Kepala Subbagian LPSE, pejabat pengadaan (kelompok kerja), dan pelaku usaha selaku penyedia (jasa dan barang yang disediakan pelaku usaha, yang sesuai dengan ketentuan kontrak) yaitu Warung Nikmat Sinjai selaku pelaku usaha dan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

a. Efektivitas dalam Berkomunikasi

Tolak ukur komunikasi yakni tingkat efektivitas komunikasi yang dilakukan terkait dengan informasi yang disampaikan soal aplikasi e-katalog. Wawancara dilakukan peneliti bersama dengan kelompok kerja atau pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan barang/jasa, menerangkan: “..Komunikasinya itu tetap melalui sosialisasi, sosialisasinya itu dilakukan oleh LPSE bahwa umk sudah bisa mendaftarkan barangnya dikatalog sesuai dengan etalasenya masing-masing sesuai usaha bidangnya. Cara kami yaitu mengundang para pelaku usaha dan respon pengusaha itu sangat baik” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Februari 2024).

Hasil wawancara diatas mengartikan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik sukses dalam penyampaian pengetahuan soal mudahnya barang didaftarkan kedalam e-katalog, selaras dengan masing-masing etalase yang sama dengan bidang usaha yang dilakoni mereka. Para pengusaha juga secara langsung memberi respon positif sekaligus menandakan suksesnya pendekatan ini, yang memperlihatkan bahwa informasi yang baik telah diterima dan dipahami dengan bijak. Peneliti setelahnya juga melakukan wawancara terhadap pelaku usaha ataupun penyedia, menerangkan: “..Komunikasinya bagus karna kemarin kami diundang di PBJ dan diterangkan bagaimana cara memakai aplikasinya dan kalau pun ada kendala kita bisa langsung menghubunginya” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024).

Dari hasil wawancara di atas maka penjelasan yang diberikan sekaligus undangan yang diterima para pelaku usaha soal langkah langkah dalam menggunakan aplikasi untuk e-katalog merupakan langkah yang efektif dan tepat guna. Hal ini dijelaskan sekaligus dipahami dengan lebih baik oleh para pelaku usaha soal penggunaan aplikasi ini. Tak hanya itu, secara langsung mereka bisa menghubungi dan berkomunikasi para pihak yang terkait jika terjadi kendala, ini menunjukkan juga ada pemberian dukungan dan kesediaan yang sigap dalam membantu secara teknis jika diperlukan. Proses sosialisasi yang didokumentasikan diadakan oleh PBJ terhadap para pelaku usaha dan masih berhubungan dengan e-katalog.

Hasilnya yaitu Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sangat mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan produk-produk mereka di Local E-catalog atau katalog elektronik, agar nantinya mampu meningkatkan perekonomian dilapisan masyarakat dan juga dengan mudah dapat dibeli oleh pemerintah setempat. Andi Sarifuddin selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, menegaskan bahwa aplikasi e-katalog adalah awalan dari bangkitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah masa sulit saat wabah corona virus beberapa tahun lalu, yang diharapkan bisa memberikan nilai plus untuk tumbuhnya nilai ekonomi yang terkhusus bagi para pelaku UMKM.

b. Kesepakatan Bersama (Konsensus)

Tolak ukur Konsensus atau kesepakatan bersama ialah kerja sama yang tercipta dengan lembaga yang bergerak di bidang pengadaan barang maupun jasa bersama dengan penyedia barang dan jasa lewat ketentuan kontrak, yang dalam hal ini merujuk pada penyedia barang. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa, menerangkan: “..Proses pengambilan keputusan yah sesuai dengan kontrak atau kerja sama yang telah berlaku anatar pihak pihak yang terlibat dan ini cukup efektif” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024).

Wawancara diatas menghasilkan poin dimana proses keputusan yang diambil dan dilakukan sesuai ketentuan kontrak maupun kerjasama yang terjalin dan berlaku antara pihak-pihak terkait terbukti menjadi metode yang cukup efektif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sinjai. Dan berpacu pada ketentuan kontrak maupun kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, setiap pihak yang terlibat dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih sistematis dan terbuka. Lalu, para peneliti juga melakukan sesi wawancara terhadap penyedia pelaku usaha, menerangkan: “..Kalau perubahan itu ada karena kadang ia pesanya sekian tapi realisasinya sekian dan diaplikasi itu ada namanya adendum kontrak itu nanti disitu berubah tapi intinya nanti itu tetap sesuai” (Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2024).

Hasil wawancara diatas ialah kontrak yang dilaksanakan nantinya dirubah dan diatur lewat adendum kontrak, prosedur yang sebisa mungkin menyesuaikan keperluan dalam kontrak tanpa sama sekali mengubah beberapa tujuan awal maupun substansi dari kesepakatan yang disepakati diawal. Walaupun tetap ada ketidaksesuaian antara realisasi sesungguhnya dan pesan awal, adendum kontrak juga memberi kemungkinan bahwa beberapa pihak yang campur tangan yang merubah perubahan yang diperlukan agar kontrak tetap sesuai dan relevan dengan kebutuhan yang berkembang. Dokumentasi berikut memuat proses LPSE yang menjelaskan kepada para pelaku usaha untuk mendaftar e-katalog ke kantor.

c. Petunjuk Teknis E-Katalog

Tolak ukur petunjuk teknis atau panduan ini ialah menyajikan panduan maupun tulisan dokumentasi berupa petunjuk tahapan demi tahapan soal digunakannya aplikasi untuk e-katalog, yang membuat penggunanya bisa mengikuti panduan tersebut ketika mereka menghadapi kendala atau memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menerangkan: “..Sebelum e-katalog itu kami sudah keliling ke OPD, OPD melakukan sosialisasi untuk bagaimana menggunakan aplikasi dan kami mengumpulkan penyedia dan pengguna barang jasa ini untuk bagaimana cara menggunakan atau mengarahkan bagaiman penggunaan e-katalog itu sendiri dan melalui selebaran informasi di media sosial” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 januari 2024).

Sesi tanya jawab diatas menunjukan pengupayaan dilakukannya sosialisasi sebelum diterapkannya e-katalog bahwa dilakukannya pendekatan dengan beberapa langkah ini merupakan bagian strategis dalam rangka menjamin serta memperkenalkan paham yang bijak soal e-katalog ini digunakan. Waktu berkunjung ke beberapa OPD atau Organisasi Perangkat Daerah dan pengumpulan penyedia dan pengguna tiap barang jasa, pihak yang beririsan sukses memberi panduan-panduan yang praktis soal e-katalog dan kegunaannya. Pelaksanaan sosialisasi tersebut juga dilaksanakan lewat daring seperti sosial media maupun luring seperti selebaran yang diberikan, sehingga bisa menjangkau lebih luas terhadap masyarakat dan tingkat untuk menyadarkan tentang sistem aplikasi e-katalog pun semakin meningkat. Setelahnya, para peneliti juga melakukan sesi wawancara terhadap tim kerja atau otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, menerangkan: “..Pengguna dalam hal konsumen yaitu adalah kementrian lembaga atau pemda bahwa aplikasi e-katalog itu membuat akses lebih mudah selalu diperbaharui atau di update dari segi sistemnya ataupun barangnya,

informasi barang menjadi lebih transparan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif.” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024).

Dari sesi tanya jawab diatas berisikan aplikasi untuk e-katalog yang digunakan Kementerian Lembaga maupun Pemda telah mendapat pengaruh yang baik secara berarti. Sistem aplikasi tersebut tak hanya mempermudah akses yang dirasakan para pengguna, tetapi juga dimodernisasi dan disempurnakan mulai dari segi sistem hingga informasi mengenai barang. Sekaligus menjadikan proses jasa hingga pengadaan barang jadi jauh lebih efektif, karena konsumen secara cepat bisa mengetahui ketersediaan beragam barang mulai dari informasi ketersediaan, spesifikasi barang yang transparan, dan juga harga barang tersebut. Dokumentasi sosialisasi yang dilaksanakan PBJ soal pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog dan dihadapkannya OPD dan PPK Kabupaten Sinjai sebagai berikut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Drs. Akbar, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan di Ruang Pola, Kantor Bupati Sinjai. Tujuan kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengguna anggaran, otoritas pengelola dana anggaran, pejabat yang membuat komitmen dalam bidang pengadaan terhadap barang atau jasa oleh pemerintah. Sekretaris daerah, Drs. Akbar, M. Si, melakukan pelaksanaan sosialisasi untuk mengharapkan kepada para kepala OPD, PPK, PPTK atau dalam hal ini pengguna dana anggaran, kuasa pengguna dana anggaran, untuk mereka sama-sama satu paham mengenai seperti apa sistem dan prosedur penggunaan dana anggaran yang secara langsung terintegrasi dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Unit Pengadaan Barang dan Jasa juga menyelenggarakan Forum Grup Diskusi (FGD) yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai serta seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini didokumentasikan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Dilaksanakannya Fokus Grup Diskusi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung B, Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, dan dihadapkannya daerah kecamatan ssatu kabupaten Sinjai dan seluruh bagian yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Lewat Fokus Grup Diskusi ini, pelaksanaan pengadaan Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai diharapkan dapat terlaksana secara tertib, terstruktur, dan optimal, terkhusus Aspek-aspek yang berkaitan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), tingkat penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), serta pemanfaatan e-Katalog lokal, dan juga monitoring untuk evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang dijadikan fokus utama selama enam hari Fokus Grup Diskusi ini berlangsung.

3. Penyesuaian (Adaptasi)

Konsep dari adaptasi sendiri ialah Lembaga pemilik kebijakan melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog, meliputi paham akan aplikasi yang digunakan, nilai harga yang disesuaikan, dan perubahan dan pembaharuan yang fleksibel. Tolak ukurnya ialah paham akan aplikasi, nilai harga yang disesuaikan, dan perubahan dan pembaharuan yang fleksibel.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap empat informan utama, yang terdiri dari Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggota Kelompok Kerja, serta pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan, penyedia (para pelaku usaha selaku penyedia barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak) yaitu pemilik unit usaha Warung Nikmat Sinjai serta PPK dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

a. Pengetahuan Pengguna Mengenai E-Katalog

Tolak ukur dari pemahaman ini yaitu pejabat pemerintah yang memiliki pemahaman memadai terhadap penggunaan aplikasi e-Katalog guna melaksanakan transaksi pengadaan secara daring, sebagaimana dibutuhkan oleh lembaga maupun instansi pemerintah. Wawancarapun dilakukan peneliti terhadap kepala sub LPSE, menerangkan: “..Kalau tingkat pemahaman kami yah pasti sangat memahami cuman yang agak sulit itu tingkat pemahaman penyedia terhadap proses aplikasi jadi yang harus kami maksimalkan itu memberikan pemahaman lagi kepada penyedia” (Hasil wawancara pada tanggal 30 januari 2024).

Hasil wawancara diatas berisikan bahwa tingkatan pemahaman dari LPSE atau pihak terkait, selaku pihak yang melaksanakan, terhadap aplikasi e-katalog terbilang cukup tinggi. Akan tetapi, pemahaman penyedia terhadap tahapan aplikasi tersebut menjadi tantangan yang ada. Oleh karenanya, upaya maksimal perlu dilakukan guna membuat para penyedia semakin paham akan nilai plus dari aplikasi sistem e-katalog serta penggunaannya. Lewat pemahaman yang ditingkatkan, penyedia diharapkan bisa lebih mahir dalam memanfaatkan aplikasi e-katalog secara efisien dan juga efektif, yang nantinya bisa mendorong tercapainya penerapan e-katalog dalam proses pengadaan barang maupun jasa, yang dilakukan di daerah Kabupaten Sinjai. Setelahnya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku unit usaha ataupun penyedia, menerangkan: “..Menurut saya lebih efektif karena lebih jelas apa yang di beli” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 februari 2024).

Dalam sesi wawancara diatas menghasilkan intisari yakni e-katalog yang digunakan dalam prosesi pengadaan barang dan jasa di daerah Kabupaten Sinjai disinyalir lebih efektif, dikarenakan kejelasan yang diberikan lebih terperinci soal barang maupun jasa yang dibeli dan digunakan. Dengan e-katalog ini, informasi yang didapat soal barang maupun jasa bisa disediakan sangat terperinci dan transparan, yang nantinya para pengguna lebih mudah memahami hal mengenai spesifikasi barang, Harga barang, maupun kondisi lain mengenai barang tersebut. Maka dari itu, efektivitas akan meningkat dalam mengambil keputusan-keputusan dan pengadaan barang jasa yang dikelola di daerah Kabupaten Sinjai, lewat e-katalog ini.

b. Harga yang Disesuaikan

Tolak ukur soal penyesuaian harga ialah tampilan Harga diskon yang ditampilkan oleh perusahaan di Aplikasi e-Katalog disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan secara khusus, sehingga memungkinkan pihak pengguna di lingkungan perusahaan untuk memantau proses negosiasi harga yang telah dilakukan. Para peneliti yang setelahnya juga melakukan sesi tanya jawab terhadap pemilik usaha ataupun penyedia, menerangkan: “..Untuk diskon itu tidak ada yah kami sesuaikan saja dengan berapa pesanan kami sesuaikan dengan harga kesepakatan saja dan tidak mempengaruhi keputusan pengadaan” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024).

Hasil tanya jawab diatas berisikan bahwasannya dengan adanya diskon sama sekali tak mempengaruhi berbagai keputusan soal pengadaan, tapi justru bergantung terhadap perjanjian soal harga yang disetujui antar pihak yang campur tangan. Maka dari itu, konsistensi dan kejelasan jadi fokus Utama yang ada dalam penetapan Harga yang disepakati, sehingga memastikan keadilan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta tingkat transparansi di Kabupaten Sinjai. Yang selanjutnya membuat para peneliti melakukan wawancara terhadap PPK Sekretaris DinKes, menerangkan: “..Terdapat negosiasi dan kesulitannya masih ada yaitu masih sulit mendapatkan negosiasi harga yang tepat antara kita yang mau menggunakan barang dan yang menyediakan barang” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024).

Hasil sesi tanya jawab diatas menjelaskan yakni terjadinya proses negosiasi serta masih adanya kesulitan, seperti kesulitan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antar harga yang diinginkan, antara kita selaku pengguna barang dan mereka selaku penyedia barang.

c. Perubahan dan Pembaharuan yang Fleksibel

Tolak ukur fleksibilitas dalam pembaharuan dan perubahan adalah kemudahan memperbarui informasi yang dilakukan perusahaan secara mudah untuk ditampilkan di aplikasi e-katalog, yang berkaitan pada pembaruan produk serta perubahannya seperti Harga maupun informasi lainnya. Kemudian, penelitian pun juga dilakukan lewat sesi tanya jawab dengan Kepala Sub Bagian LPSE, menerangkan: “..Untuk fleksibilitas yaitu e-katalog sangat merespon ketika ada aplikasi sistem karna di beberapa daerah atau lembaga itu di lkpp dapat merespon hal itu dengan menerbitkan r baru atau penemuan item pada sistem yang dapat memadahi masalah yang terjadi yang dialami oleh lembaga atau daerah pengguna e-latalog. Ini kan sistem diterbitkan oleh lkpp jadi responnya lkpp itu tergantung dari survey yang mereka kirim dan feedback yang mereka terima jadi responnya cepat” (Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024).

Sesi tanya jawab tersebut menghasilkan pernyataan yang dapat diartikan dengan dukungan yang diberikan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), e-katalog ini bisa dengan mudah merespon secara kilat untuk permintaan maupun berbagai masalah yang dialami para penggunanya, mulai dari penambahan item baru pada sistem atau rilisan baru yang diterbitkan. Dasar dari respon cepat ini adalah respon dan survei dari para pengguna yang diterima oleh LKPP, yang kemudian membuka peluang bagi pengembangan dan penyesuaian secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan para penggunanya. Maka dari itu, tingkat fleksibilitas yang dimiliki oleh e-katalog merupakan salah satu keunggulan utama yang berpotensi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat daerah maupun pada berbagai lembaga. Peneliti juga mewawancarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Dinas Kesehatan, menerangkan: “..Tidak fleksibel karna seharusnya ada kontrak payung terlebih dahulu mengenai harga dan seharusnya tidak langsung memasukkan harga a bgitu saja”. (Hasil Wawancara pada tanggal 2 februari).

Wawancara diatas menghasilkan pernyataan yang berarti bahwa adanya kebutuhan maka lebih banyak pula ketentuan terkait harga ditetapkan terlebih dahulu dalam kontrak payung sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, sebelum nantinya harga tersebut dimuat kedalam sistem di aplikasi e-katalog. Hal ini terbilang sangatlah krusial guna memastikan bahwa harga yang tercantum dalam e-katalog telah melalui proses negosiasi dan kesepakatan yang memadai, sehingga bisa terhindar dari penyesuaian harga yang tidak fleksibel dikemudian hari.

Penelitian ini menghasilkan intisari yang menunjukkan bahwa e-katalog yang digunakan di Kabupaten Sinjai dalam pengadaan barang dan jasa telah memberikan hasil yang signifikan. Terdapat peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan melalui penerapan e-katalog, yang mempercepat proses pencarian, seleksi penyedia, serta negosiasi untuk menyepakati sebuah harga. Tak hanya itu, tingkatan dari proses transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang juga mengalami peningkatan, mengingat e-katalog menyediakan informasi yang terperinci dan memungkinkan proses pemantauan secara lebih terbuka terhadap anggaran publik. Dan juga para penyedia yang dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan jadi lebih banyak lagi, persaingan serta kualitas jadi lebih bisa meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa berkurangnya Implementasi e-katalog menghasilkan efisiensi waktu dalam proses pengadaan hingga 30%, serta penghematan biaya administrasi sebesar 20%. Namun, perlu diperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penggunaan e-katalog, serta adopsi teknologi oleh pihak terkait. E-katalog yang terintegrasi bersama sistem yang telah ada juga secara langsung meningkatkan efisiensi pengadaan, tetapi keamanan data dan privasi informasi tetap menjadi perhatian. Adapun adaptasi e-katalog memerlukan upaya kolaboratif dan perubahan budaya organisasi yang signifikan, serta regulasi yang mendukung inovasi. Peningkatan pemanfaatan e-katalog

menunjukkan bahwa LPSE telah menyediakan suatu sistem yang mampu mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pemanfaatan aplikasi e-katalog yang diterapkan di daerah Kabupaten Sinjai terbilang sukses dalam meraih pokok-pokok tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengadaan yang dilakukan. Aplikasi e-katalog yang digunakan ini sekaligus membuat efisiensi mengalami peningkatan lewat proses pengadaan, salah satunya dengan mempercepat identifikasi para penyedia, penawaran yang diajukan, dan transaksi yang telah diselesaikan. Hal lainnya ialah transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan juga ditingkatkan lewat informasi yang tersedia secara lengkap dan detail, tentang barang dan jasa yang tersedia.

Aplikasi e-katalog yang digunakan juga sukses membantu peningkatan integritas dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Kabupaten Sinjai. Lewat sistem ini, jadi lebih terpusat dan transparan, dan secara langsung dapat meminimalisir resiko praktik negative seperti korupsi yang tidak dibenarkan. Hal lainnya ialah e-katalog yang diadopsi juga dapat memicu daya saing yang lebih sehat antar para penyedia barang dan jasa, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas barang serta harga yang diajukan.

Walaupun adaptasi soal teknologi tidak setiap saat sukses dan lancar, Kabupaten Sinjai sukses menunjukan kemajuan dalam menghubungkan e-katalog ke bagian sistem pengadaan yang ada. Budaya organisasi yang berubah jadi tantangan, termasuk kesiapan teknologi dan juga kebijakan pengadaan yang mendukung telah dihadapi dengan langkah-langkah tepat, seperti pelatihan para staf, infrastruktur teknologi yang meningkat, dan relevansi mengenai pembaruan regulasi. Ini sekaligus menunjukan bahwa adanya komitmen yang kokoh dari pemda untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M., Syaripudin, A., & Septian, F. (2022). Pengukuran Efektivitas Kinerja Ti pada Sistem Pembayaran Parkir Elektronik Dengan Metode IT Balanced Scorecard. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 390–409.
- Apridiansyah, Y., & Wijaya, A. (2019). Aplikasi E-Commerce Hasil Laut Bengkulu Dengan Penerapan Algoritma Seo Menggunakan Model Sematik Web. *Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis*, 1(5), 194–200.
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan barang dan jasa Melalui E-katalog di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- Asiah, S. (2016). Efektivitas Kinerja Guru. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–11.
- Chandra, W., Anggraini, D., & Hutabarat, F. A. M. (2022). Epic Model: Pengukuran Efektifitas Komukasi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Medan Pada Masa New Normal. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*, 4(2), 716–724.
- Diani, F., & Lubis, F. A. (1970). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan Umkm di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan Umkm di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 8(2), 1970–1981.
- Fahrudin, Rachmayani, I., Astini, B. N., & Safitri, N. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Kartu Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak. *Journal of Classroom Action Research*, 4(1), 49–53. <https://doi.org/10.29303/jcar.v4i1.1378>
- Gultom, R. (2021). Evaluasi Kepatuhan Pasien Anak Penderita Diare Terhadap Penggunaan Antibiotik Di Rumah Sakit Umum (Rsu) Karya Bakti Ujung Bandar Rantauprapat. *Jifi (Jurnal Ilmiah Farmasi Imelda)*, 4(2), 37–42.
- Hafidz, J., & Widodo, A. (2015). Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Oleh Penyedia Barang Dan Jasa Atau Pengguna Jasa Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 151–161.
- Hamrun, Harakan, a., prianto, a. L., & khaerah, n. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan berbasis *e- government* di kabupaten muna. 64–78.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Jibril, A. (N.D.). *Efektivitas Program*. Perpuseru.
- Kusumawati, E. (2023). Efektivitas Kerja Guru. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1487–1492. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1578>
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113–133.
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 140–155.
- Malinda, Y. S. H. (2018). Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-katalog. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90–105.
- Marbun, R. (2015). *Tanya Jawab seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Mariono, Y. (2020). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya* (Doctoral Dissertation, STIE Mahardhika).
- Rakhmadani, D. P., & Wicaksono, S. R. (2015). Sistem Informasi Pengukuran Efektivitas Produksi Berbasisweb (Studi Kasus: Pt. Beiersdorf Indonesia). *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 4(2), 70–76.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rante Rerung, R. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung UMKM Berbasis Teknologi Informasi Analysis and Design of MSMEs Support System Based on Information Technology. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 19–30.
- Saputra, R. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi). *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(1), 39–50. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.9638>
- Sastika, W. (2018). Epic Model: Pengukuran Efektivitas Iklan Kuliner Melalui Sosial Media Instagram @Kulinerbandung Sebagai Media Promosi. *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi & Manajemen*, 1(01), 21–27.
- Setiawan, C. A., & Rosa, T. (2023). The Analysis of the Effect of Return of Investment (RoI) On Stock Price and Financial Performance of a Company. *Journal of Accounting, Management, Economics, And Business (Analysis)*, 1(1), 20–29.
- Sihombing, V., & Yanris, G. J. (2020). Penerapan Aplikasi Dalam Mengolah Aset Desa (Studi Kasus: Kepenghuluan Sri Kayangan). *Jurnal Mantik Penusa*, 4(1), 12–15.

- Sinulingga, S. (2021). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Steers, R. M., & Yamin, M. (1980). *Effectivitas Organisasi: Kaidah Tingkah Laku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, A. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259.
- Sutarini, I. A. (2019). Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Baliho Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Generasi Milenial. *Senada (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2, 237–241.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wastito, G. H. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Widiansyah, A. (2021). Analisis Model Pembelajaran Reflektif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(1), 19-24. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.9619>